

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER I).....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 Triwulan II (Semester I)	II-1
2.2. Analisis Kinerja KECAMATAN NGARGOYOSO.....	II-26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO	II-26
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-2
3.2. Program dan Kegiatan	III-2
3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD	III-10
3.4. Dana Indikatif	III-11
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja	IV-1
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025	II-10
Tabel 2.3	Kesesuaian antara Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	II-13
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni 2025	II-18
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025	II-22
Tabel 3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif	III-4
Tabel 3.3	Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025	III-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025	II-6
Gambar 2.2	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara RKPD Tahun 2024 dengan Renja Tahun 2025	II-8
Gambar 2.3	Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025	II-16
Gambar 3.1	Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025	III-10

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86b Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Ngargoyoso, Juni 2025
Pit. CAMAT NGARGOYOSO

SUWARDYO, S.H.
Pembina
NIP. 19690526 198803 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai dengan aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau

- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya:

- a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
- b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran “Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Tahun 2025. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan subkegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas;
5. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Ngsrgoyoso Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso, alasan perubahan, keterkaitan antara Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Ngargoyoso, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan

penganggaran Kecamatan Ngargoyoso.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024 TRIWULAN II (SEMESTER I)

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sampai Triwulan II (Semester I), yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Subbab ini memuat penjelasan/uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2. Analisis Kinerja Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Ngargoyoso, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Ngargoyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTER 1)

Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KECAMATAN NGARGOYOSO Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).

Pada sub bab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2024, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025.

Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

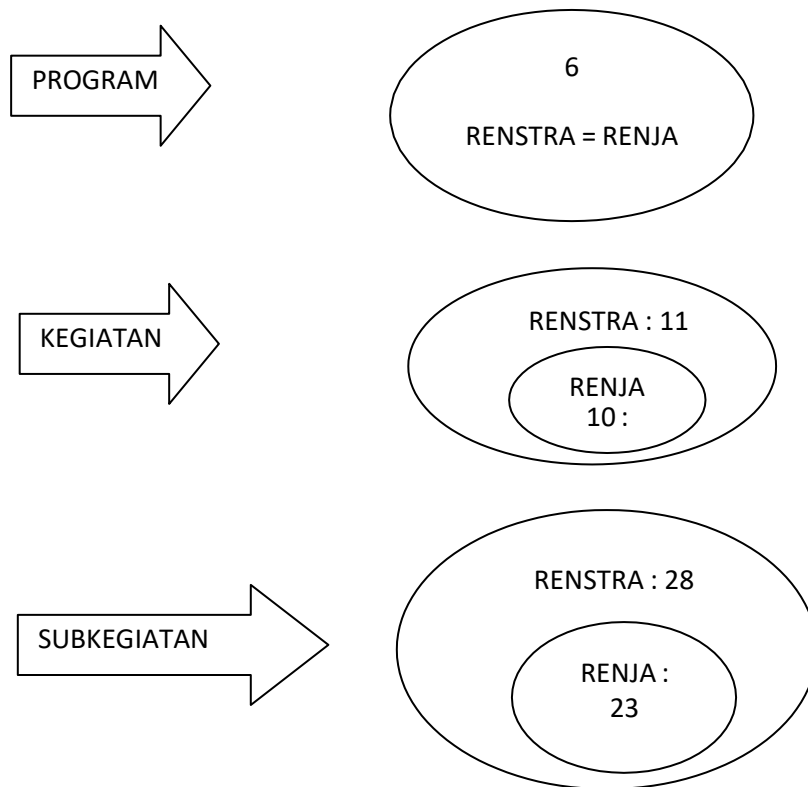
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan		
					Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp	
1	2			3	3	4	5	6	7	8	
7				Kecamatan Ngargoyoso		2.678.105		2.586.016,69		92.088,31	
7.01				Unsur Kewilayahan		2.678.105		2.586.016,69		92.088,31	
7.01				Kecamatan		2.678.105		2.586.016,69		92.088,31	
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	2.300.000	97%	2.170.998,29	=	129.001,71
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.200	100%	3.493,5	=	1.706,5
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.200	3 dokumen	2.216,8	=	-16,8
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.000	3 laporan	1.276,7	=	1.723,3
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.794.660	90%	1.855.327,24	=	-60.667,24
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	1.794.660	14 orang/bulan	1.855.327,24	>	-60.667,24
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	152.290	100%	123.184,6	=	29.105,4
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	6.000	12 paket	4.094,7	=	1.905,3
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	17.000	12 paket	12.068	=	4.932
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.500	12 paket	7.739	=	-239
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	12 paket	3.500	12 paket	3.200	=	300

7.01	01.2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.400		0	>	2400
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	115.190	12 Laporan	0	=	115.190
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	700	12 dokumen	3.532,4	=	-2.832,4
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81.500	0	0	>	81.500
7.01	01.2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	30.000	0	0	>	30.000

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2Unit	24.000	0	0	>	24.000
7.01	01.2	07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 unit	27.500	0	0	>	27.500
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	185.400	100%	133.208,7	=	52.191,3
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	109.200	12 laporan	58.808,7	=	50.391,3
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.800	12 laporan	24.600	=	1.200
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	50.400	12 laporan	49.800	=	600
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	80.950	100%	55.784,3	=	25.165,7
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	41.000	6 unit	38.857,8	<	2.142,2
7.01	1.02	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	17.950	0	0	>	17.950
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	22.000	1 unit	16.926,5	>	5.073,5
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,3	945	85,3	36.743,4	=	-34.253,4
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,3	945	85,3	36.743,4	=	-35.798,4
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	945	1 laporan	36.743,4	=	-35.798,4
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	133.560	100 %	144.750	=	-11.190
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	133.560	100%	144.750	=	-11.190

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	127.200	12 Laporan	144.750	=	-112.450
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	120.750	100 %	119.215	=	1.535
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	120.750	100 %	119.215	=	1.535
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	71.000	70 orang	82.115	=	-11.115
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	49.750	25 Orang	37.100	=	12.650
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	52.500	100 %	71.645	=	-19.145
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	52.500	100 %	71.645	=	-19.145
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	7.000	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	=	2.000
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	45.500	12 Laporan	66.645	=	-21.145
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	70.350	100 %	78.665	=	-8.315
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	70.350	100 %	78.665	=	-8.315
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	63.850	12 Dokumen	75.340	=	-11.490
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	3.500	12 Dokumen	2.800	=	700
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 Dokumen	3.000	1 Dokumen	525	>	2.475

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

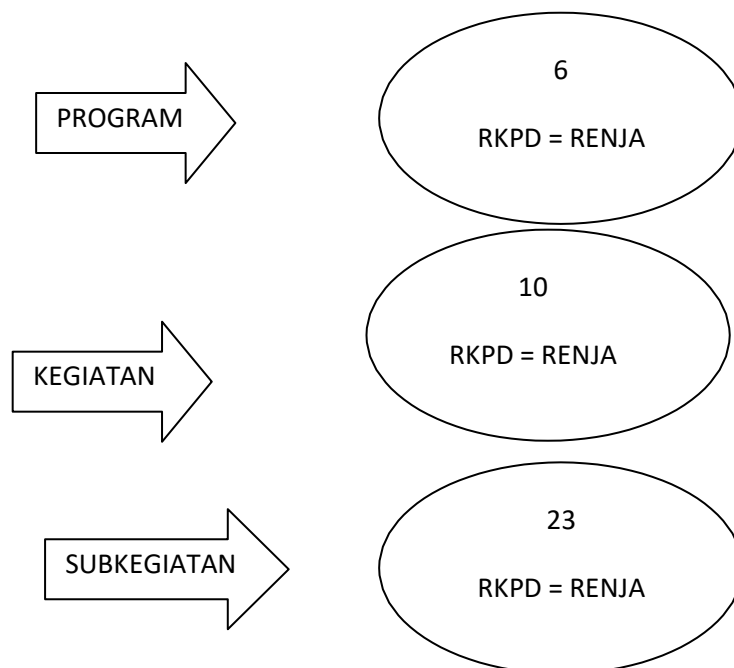
1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
- Kegiatan konsistensi sebesar : $(10/11) \times 100 \% = 90,90 \%$ (Kegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 1 kegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 90,90 % sesuai dengan Renstra, karena hanya 1 kegiatannya terdapat dalam Renstra.
1 Kegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
 - a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan dalam anggaran Renja lebih sedikit dari Renstra
- Subkegiatan konsistensi sebesar : $(23/28) \times 100\% = 82,14 \%$ (Subkegiatan dalam Renja semua terdapat dalam Renstra, namun terdapat 5 subkegiatan dalam Renstra yang tidak ada dalam Renja/belum dilaksanakan), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 82,14 % sesuai dengan Renstra, karena hanya 5 subkegiatannya terdapat dalam Renstra. 5 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan :karena pada tahun 2025 lebih menggunakan google untuk mencari berita atau untuk bahan bacaan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : karena adanya efisiensi anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas dihilangkan;
 - c. Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Lainnya: karena rekening belanja dijadikan satu dengan pengadaan peralatan dan mesin lainnya ;
 - d. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: karena menyesuaikan alokasi anggaran dan rencana dilaksanakan pada saat Perubahan APBD
 - e. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya, dikarenakan keterbatasan anggaran.
- 2) Kesesuaian indikator dan target
- Indikator dan Target di Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra dan Renja sebagian besar Konsisten sama
- 3) Kesesuaian alokasi anggaran
- Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam Renja Rp.2.710.254.687.- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp.2.678.105.000.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Ngargoyoso.
 - Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Pengadaan Surat Menyurat sebesar Rp.50.391.300,-

2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ngargoyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025. Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - o Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
 - o Kegiatan konsistensi sebesar 100% (10 Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam RKPD)
 - o Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (23 Sub Kegiatan dalam Renja sama dengan Sub Kegiatan dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
 - o Program konsistensi indikator dan target
 - o Kegiatan konsistensi indikator dan target
 - o Sub kegiatan konsistensi indikator dan target

3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Terdapat kesamaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 2.586.016.687,-

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
					Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1	2			3	3	4	5	6	7	8
7	Kecamatan Ngargoyoso					2.586.016,69		2.586.016,69	=	0,00
7.01	Unsur Kewilayahan					2.586.016,69		2.586.016,69	=	0,00
7.01	Kecamatan					2.586.016,69		2.586.016,69	=	0,00
7.01	01	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	2.170.998,29	97%	2.170.998,29	=	0,00
7.01	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	100%	3.493,5	=	0,00
7.01	01.2	01	0001 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	=	0,00
7.01	01.2	01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276,7	3 laporan	1.276,7	=	0,00
7.01	01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.855.327,24	90%	1.855.327,24	=	0,00
7.01	01.2	02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.855.327,24	14 orang/bulan	1.855.327,24	=	0,00
7.01	01.2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	123.184,6	100%	123.184,6	=	0,00
7.01	01.2	06	0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	4.094,7	12 paket	4.094,7	=	0,00
7.01	01.2	06	0002 Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	12.068	12 paket	12.068	=	0,00
7.01	01.2	06	0004 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	12 paket	7.739	=	0,00
7.01	01.2	06	0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3.200	12 paket	3.200	=	0,00
7.01	01.2	06	0009 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	0	=	0,00
7.01	01.2	06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532,4	12 dokumen	3.532,4	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133.208,7	100%	133.208,7	=	0,00
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	58.808,7	12 laporan	58.808,7	=	0,00
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24.600	12 laporan	24.600	=	0,00
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	49.800	12 laporan	38.600	=	0,00
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55.784,3	100%	55.784,3	=	0,00
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	38.857,8	6 unit	38.857,8	=	0,00
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.926,5	1 unit	41.926,5	=	0,00
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,3	36.743,4	85,3	36.743,4	=	0,00
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,3	36.743,4	85,3	36.743,4	=	0,00
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.743,4	1 laporan	36.743,4	=	0,00
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	144.750	100 %	144.750	=	0,00
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	144.750	100%	144.750	=	0,00
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.750	12 Laporan	144.750	=	0,00
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	119.215	=	0,00

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA		Keterangan	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	Target	Rp
1				2	3	3	4	5	6	7	8
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan OPemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	119.215	=	0,00
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 orang	82.115	70 orang	82.115	=	0,00
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	37.100	25 Orang	37.100	=	0,00
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	71.645	100 %	71.645	=	0,00
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	71.645	100 %	71.645	=	0,00
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	5 lembaga kemasyarakatan	5.000	=	0,00
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.645	12 Laporan	66.645	=	0,00
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	78.665	100 %	78.665	=	0,00
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	78.665	100 %	78.665	=	0,00
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340	12 Dokumen	75.340	=	0,00
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	2.800	=	0,00
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525	1 Dokumen	525	=	0,00

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Nargoyoso Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Nargoyoso untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Nargoyoso dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.

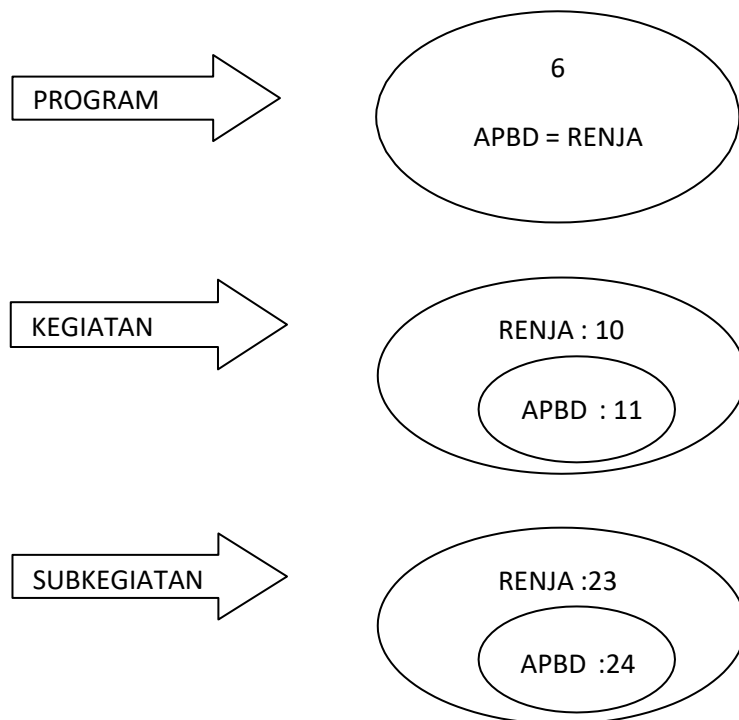
Kesesuaian antara Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif (Rp. 000)	Pagu (Rp. 000)	
1				2	3	4	5
7				Kecamatan Nargoyoso	2.586.016,69	2.724.316,69	94,92%
7.01				Unsur Kewilayahan	2.586.016,69	2.724.316,69	94,92%
7.01				Kecamatan	2.586.016,69	2.724.316,69	94,92%
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.170.998,29	2.273.298,29	95,49%
7.01	01. 2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493,5	3.493,5	100,00%
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	2.216,8	2.216,8	100,00%
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.276,7	1.276,7	100,00%
7.01	01. 2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.855.327,24	1.943.627,24	95,46%
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.327,24	1.943.627,24	95,46%
7.01	01. 2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.184,6	124.259,6	99,13%
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.094,7	4.094,7	100,00%
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.068	12.068,3	100%
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	7.739	7.739	100%
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.200	3.200	100%
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	92.550	93.625	98,85%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.532,4	3.532,4	100,00%
7.01	01. 2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	12.925	-100,00%
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12.925	-100,00%
7.01	01. 2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.208,7	133.208,7	100%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
					Pagu indikatif (Rp. 000)	Pagu (Rp. 000)	%
1				2	3	4	5
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	58.808,7	58.808,7	100,00%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	24.600	24.600	100,00%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.800	49.800	100,00%
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.784,3	55.784,3	100,00%
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	38.857,8	38.857,8	100,00%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.926,5	16.926,5	100,00%
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA Pelayanan Publik	36.743,4	36.743,4	100,00%
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.743,4	36.743,4	100,00%
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36.743,4	36.743,4	100,00%
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.750	144.750	100,00%
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	144.750	144.750	100,00%
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	144.750	144.750	100,00%
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	119.215	119.215	100,00%
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	119.215	119.215	100,00%
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	82.115	82.115	100,00%
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	37.100	37.100	100,00%
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71.645	71.645	100,00%
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71.645	71.645	100,00%
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000	5.000	100,00%
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	66.645	66.645	100,00%
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	78.665	78.665	100,00%
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.665	78.665	100,00%
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	75.340	75.340	100,00%
7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.800	2.800	100,00%

7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	525	525	100,00%
------	------	----	------	--	-----	-----	---------

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar 2.3

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar $10/11 \times 100\% = 90,91\%$ (Kegiatan dalam Renja semua ada di APBD, namun terdapat 1 kegiatan dalam renja yang tidak ada dalam APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan di Renja 90,91% sesuai APBD, karena hanya satu kegiatan yang tidak terdapat di APBD)
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar $23/24 \times 100\% = 95,83\%$ (Subkegiatan dalam Renja semua ada di APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa sub kegiatan di Renja 95,83% sesuai APBD, karena hanya ada satu kegiatan yang tidak terdapat di APBD);
2. Kesesuaian indikator dan target
 - Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.586.016.687,-, sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.724.316.687,- ada kenaikan sebesar Rp. 138.300.000.- atau (5,08%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan 6 program dengan 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp.2.724.316.687,- Sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4.

Realisasi Penyerapan Anggaran s/d Bulan Juni
2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7				Unsur Kewilayahan			2.724.316,69	867.287,84	31,8	30
7.01				Kecamatan			2.724.316,69	867.287,84	31,8	30
7.01				Kecamatan			2.724.316,69	867.287,84	31,8	30
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	2.273.298,29	757.817,74	33,34	30
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	395	11,31	10
7.01	01.2	01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	395	11,31	10
7.01	01.2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276,7	0	0	0
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.943.627,24	691.428,94	35,57	30
7.01	01.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.943.627,24	691.428,94	35,57	30
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	124.259,6	0	0	0
7.01	01.2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	4.094,7	0	0	0
7.01	01.2	06	0002	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	12.068,3	0	0	0
7.01	01.2	06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	0	0	0
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3.200	0	0	0

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2	3	4	5	6	7	8
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	93.625	0	0	0
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532,4	0	0	0
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.925	0	0	0
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	12.925	0	0	0
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133.208,7	42.927,8	32,22	30
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	58.808,7	19.600	33,33	30
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24.600	6.727,8	27,35	20
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49.800	16.600	33,33	30
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55.784,3	23.066	41,35	40
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	38.857,8	11.448	29,46	20
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	16.926,5	11.618	69	60
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	85,3	36.743,4	11.200	30,48	30
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,3	36.743,4	11.200	30,48	30
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.743,4	11.200	30,48	30
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	144.750	47.200	32,61	30

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN		APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
										Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp. 000)	(Rp.000)	%	
1				2				3		4	5	6	7	8
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah		100%	144.750	47.200	32,61	30
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan				Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 Laporan	144.750	47.200	32,61	30
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				PersentaseKegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan		100 %	119.215	11.200	9,39	9
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah				Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan		100 %	119.215	11.200	9,39	9
7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan				Jumlah Orangyang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		70 Orang	82.115	0	0	0
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		25 Orang	37.100	11.200	30,19	30
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif		100 %	71.645	17.790	24.83	20
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan		100%	71.645	17.790	24,83	20
7.01	03.2	01	0001	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa		5 Lembaga kemasyarakatan	5.000	1.250	25	25
7.01	03.2	01	0003	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		12 Laporan	66.645	16.540	24,82	20
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan		100 %	78.665	25.500	38,17	30
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	78.665	25.500	38,17	30
7.01	06.2	01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	75.340	22.080	29,31	20

7.01	06.2	01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800			
7.01	06.2	01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525			

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) dalam 1 Semester di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 867.287.838,- atau 31,8%. Untuk program penunjang urusan pemerintahan Daerah/kota realisasi anggaran 33,34 %, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik realisasi anggaran 30,48 %, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi anggaran sebesar 24,83 %, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum realisasi anggaran sebesar 32,61 %, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasi anggaran sebesar 9,39% dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 38,17 %.

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II atau Semester I adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.5.

Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Bulan Juni 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Targe t Kinerj a	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7.01				Kecamatan			
7.01				Kecamatan			
7.01	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	30
7.01	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45
7.01	01.2	01	000 1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	1. RKA 2025 2. DPA 2025 3. Renja 2026
7.01	01.2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1. SAKIP 2. LPT 3. CALK
7.01	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	30
7.01	01.2	02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bul an	Gaji dan TPP 14 orang selama 5 bulan dan THR Th. 2025
7.01	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0
7.01	01.2	06	000 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	000 2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	000 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di disediakan	12 paket	KKPD
7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	KKPD

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD Target Kinerja	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
1				2	3	4	8
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	KKPD
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	KKPD
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	30 %
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40 %
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Sudah dilaksanakan 30%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Dilaksanakan bulan Mei 60 %
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	85,3	Akhir Tahun
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,3	akhir tahun
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Akhir tahun
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	30 %
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	30 %
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	9 %
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasann Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	9 %

7.01	05.2	01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	Dilaksanakan bulan agustus
7.01	05.2	01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	Dilaksanakan semester 2

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik (%) / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
1				2	3	4	8
7.0 1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	20
7.0 1	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	20
7.0 1	03.2	01	00 01	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyaraka tan	100 %
7.01	03.2	01	0 0 0 3	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	5 laporan buln Januari-Mei 2025
7.0 1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	30
7.0 1	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	30
7.0 1	06.2	01	0 0 0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	5 dokumen buln Januari-Mei 2025
7.0 1	06.2	01	00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	5 dokumen buln Januari-Mei 2025

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Ngargoyoso

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Ngargoyoso, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Ngargoyoso terlihat adanya :

- Adanya konsistenan (perbedaan) dalam penulisan terutama untuk indikator, satuan indicator dan target;
- Terdapat kendala seringkali indikator program, kegiatan dan subkegiatan tidak bisa muncul dalam cetak DPA, karena kendala dalam aplikasi;
- Jumlah pagu indikatif dalam RKPD sesuai dengan Pagu Renja yaitu: Rp. 2.586.016.687,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.710.254.687,- ada kenaikan sebesar 4,58%.
- Sampai semester I realisasi anggaran baru mencapai 31,8%; kalau dilihat berdasarkan waktu yang telah digunakan selama 5 bulan. Hal ini berarti belum sesuai harapan disemester 1 karena kurang dari target 50 % karena adanya realisasi anggaran melalui KKPDP (Kartu Kredit Perangkat Daerah) yang dilakukan secara manual belum bisa diinput di SIPD Penatausahaan serta adanya pergantian Camat Ngargoyoso yang mengakibatkan terlambatnya proses administrasi keuangan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KECAMATAN NGARGOYOSO

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi tersebut di atas isu di Kecamatan Ngargoyoso untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah dan OPD :
 - a. Keterkaitan tujuan sasaran daerah sampai dengan keluaran / aktivitas subkegiatan OPD; (pohon kinerja, crosscutting, cascading);
 - b. konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan; daerah dan OPD.
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya meskipun sudah konsisten.
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;

4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Kecamatan Ngargoyoso juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbangcam) hanya kegiatan formalitas saja
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam mekanisme penganggaran.

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso diuraikan pada Bab III. beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Kecamatan Ngargoyoso dalam memahami penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan indikator dan penetapan targetnya;
3. Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sistem (aplikasi) untuk mengendalikan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan;
4. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin di capai Kecamatan Nargoyoso adalah

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan perlindungan sosial

3.1.2 Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Nargoyoso. Sasaran yang ingin di capai Kecamatan Nargoyoso adalah

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa

Tabel 3.1.

Perubahan Target Indikator Tujuan – Sasaran
Nargoyoso Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator tujuan	Satuan	Target Tahun 2025		Keterangan Naik / turun / =
				Sebelum	Sesudah	
I	Daerah :					
	Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indek Daya Saing Daerah	Nilai			
	Sasaran 4 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indek Reformasi Birokrasi	Nilai			
II	Kecamatan Nargoyoso					
1	Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,45	8,45	=
2	Sasaran					
	1) Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	71.11	71,11	=
	2) Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,75	=

Sumber : Renstra Kecamatan Nargoyoso, 2025

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025, tersebut diatas. Kecamatan Nargoyoso pada

tahun 2025, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dan mengacu pada sasaran 4 daerah yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya dirinci menjadi 6 program, 11 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan, pada Perubahan Renja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan isu strategis yang ditemukan di Kecamatan Ngragoyoso, maka perlu dilakukan pergeseran dan penambahan aktivitas pada subkegiatan. Penambahan aktivitas dan subkegiatan tidak merubah indikator dan target yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel berikut 3.2 :

Tabel 3.2.

Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	R P	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7				Unsur Kewilayahan			2.724.316,69		2.710.254,69	-14.062	0,005%
7.0				Kecamatan			2.724.316,69		2.710.254,69	-14.062	0,005%
7.0				Kecamatan			2.724.316,69		2.710.254,69	-14.062	0,005%
7.0	01			PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97%	2.273.298,29	97%	2.241.334,29	-31.964	0.014%
7.0	01.2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.493,5	100%	3.493,5	0,00	0%
7.01	01.2	01	000 1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 dokumen	2.216,8	3 dokumen	2.216,8	0,00	0%
7.01	01.2	01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.276,7	3 laporan	1.276,7	0,00	0%
7.0	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	1.943.627,24	90%	1.943.627,24	0,00	0%
7.01	01.2	02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bulan	1.943.627,24	14 orang/bulan	1.943.527,24	0,00	0%
7.0	01.2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	124.259,6	100%	69.430,6	-54.829	0,44%
7.01	01.2	06	000 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sediakan	12 paket	4.094,7	12 paket	4.094,7	0,00	0%
7.01	01.2	06	000 2	Penyediaan bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12 paket	12.068,3	12 paket	20.595,3	8.527	0,7%
7.01	01.2	06	000 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	12 paket	7.739	12 paket	8.902,2	1.163,2	0,15%

7.01	01.2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3.200	12 paket	2.646	-554	0,17%
7.01	01.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	93.625	12 laporan	29.660	-63.965	0,68%
7.01	01.2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	3.532,4	12 dokumen	3.532,4	0,00	0%
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.925	100%	20.925	8.000	0,61%

NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Targ et Kiner ja	Pag u (Rp. 000)	Target Kinerja	Pag u (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	01.2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12.925	100%	20.925	8.000	0,61%
7.01	01.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	12.925	5 unit	20.925	8.000	0,61 %
7.01	01.2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133.208,7	100%	122.008	-11.200,7	0,08%
7.01	1.02	08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	58.808,7	12 laporan	58.808,7	0,00	0%
7.01	1.02	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24.600	12 laporan	24.600	0.00	0%
7.01	1.02	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49.800	12 laporan	38.600	-11.200	0,22%
7.01	1.02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55.784,3	100%	81.849	26.064,7	0,46%
7.01	1.02	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	38.857,8	5 unit	39.922	1.064,2	0,03%
7.01	1.02	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	16.926,5	1 unit	41.926	24.999,5	1,47%
7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DA Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	85,3	36.743,4	85,3	35.198,4	1.545	0,04%
7.01	02.2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,3	36.743,4	85,3	35.198,4	1.545	0,04%
7.01	02.2	02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	36.743,4	1 laporan	35.198,4	1.545	0,04%
7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	144.750	100 %	142.125	-2.625	

				DAN KETERTIBAN UMUM							0,01%
7.01	04.2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100%	144.750	100%	142.125	-2.625	0,01%
7.01	04.2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	12 Laporan	144.750	12 Laporan	142.125	-2.625	0,01%

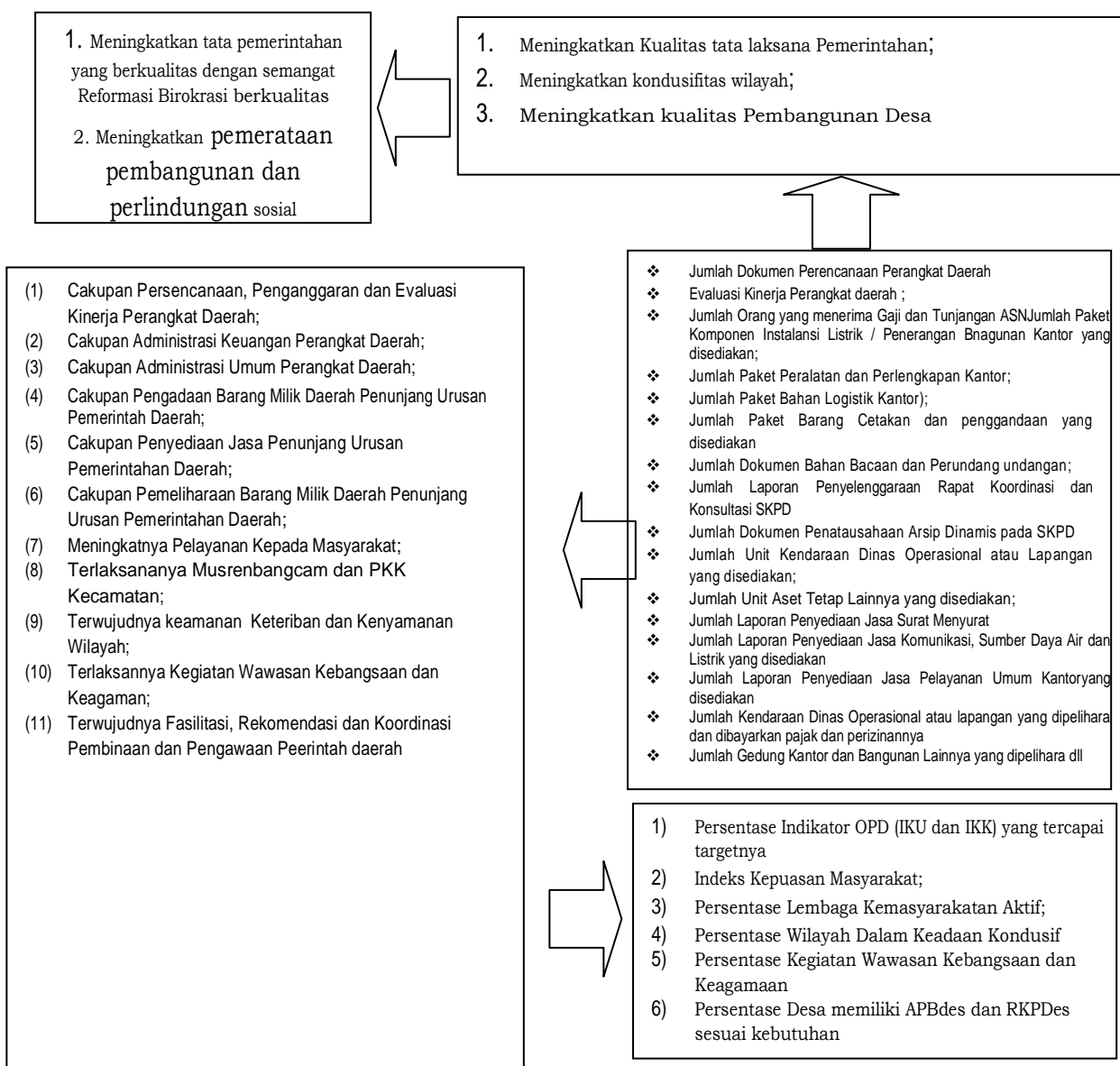
NO				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Target Kinerja	Pagu (Rp. 000)	Rp	%
1				2	3	4	5	6	7	8 =7-5	9=8/5
7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	133.975	14.760	0,12
7.01	05.2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	119.215	100 %	133.975	14.760	0,12
7.01	05.2	01	000 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	82.115	70 Orang	99.500	17.385	0,211
7.01	05.2	01	000 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25 Orang	37.100	25 Orang	34.475	2.625	0,07
7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	100 %	71.645	100 %	75.387	3.742	0,05
7.01	03.2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100%	71.645	100 %	75.387	3.742	0,05
7.01	03.2	01	00 01	Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembanguna di Desa	5 Lembaga kemasyarakatan	5.000	5 Lembaga kemasyarakan	5.000	0,00	0
7.01	03.2	01	000 3	Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.645	12 Laporan	70.387	3.742	0,05
7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	78.665	100 %	82.235	3.570	0,04
7.01	06.2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	78.665	100 %	82.235	3.570	0,04

				Pemerintahan Desa							
7.01	06.2	01	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	75.340	12 Dokumen	80.030	4.690	0,06
7.01	06.2	01	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan aset Desa	12 Dokumen	2.800	12 Dokumen	1.680	1.120	0,4
7.01	06.2	01	000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	525	1 Dokumen	525	0,00	0

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Nargoyoso, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas.. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nargoyoso, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.1
Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Nargoyoso Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3.

Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	13	11	11
3	Subkegiatan	25	24	24
4	Jumlah Dana	2.724.316.687	2.724.316.687	2.710.254.687

Sumber : Kecamatan Ngargoyoso, 2025

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

- 1) Ada penambahan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan Tunjangan PNS, karena pada saat APBD penetapan ada kekurangan gaji dan tambahan penghasilan 14 orang PNS di Kecamatan Ngargoyoso
- 2) Ada pengurangan dana sebesar Rp. 14.062.000,- yang terutama karena:
 - a. Adanya pengurangan anggaran dari kabupaten sebesar Rp. 14.062.000,-
 - b. Adanya honor THL yang resign di bulan april sehingga anggarannya diganti di kegiatan lain
 - c. Adanya pengurangan anggaran capacity building diakrenakan adanya efisiensi anggaran
 - d. Untuk pembelian Meja Esselon
- 3) Juga dilakukan pegeseran anggaran pada subkegiatan tertentu untuk penyesuaian pemenuhan kebutuhan riil dan agar penggunaan anggaran lebih efektif yaitu Subkegiatan pegeseran anggaran pada sub kegiatan persatuan dan kesatuan bangsa untuk makan minum.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan /mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;
- 3) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai Kecamatan Ngargoyoso, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
- 4) Perubahan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
- 5) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

Demikian Perubahan Renja ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

